

RINGKASAN

Harmanto, 2019, *Analisis Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Potensi Gaya Hidup hedonisme (Studi kasus pada PNS Eselon II, III dan IV Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo)*, Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP.

Permasalahan klasik pada instansi Pemerintahan adalah penyalahgunaan jabatan yang berujung pada sanksi pidana, salah satu penyebabnya adalah minimnya pendapatan yang diterima oleh PNS sehingga mereka berani melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan bergaya hidup yang serba mewah namun tidak sepadan dengan pendapatan. Selain itu trend semakin meningkatnya PNS yang mengajukan kredit di Bank Konvensional untuk mendapatkan dana segar, dimana dana tersebut biasanya digunakan untuk investasi maupun membeli barang. PNS pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hampir 85% mempunyai hutang di Bank Jatim Cabang Kraksaan sehingga tidak sedikit dari mereka penghasilan yang diterima setiap bulan dibawah satu juta. Untuk meningkatkan penghasilan PNS, Pemerintah Kabupaten Probolinggo sejak tahun 2016 sampai sekarang (2019) memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016, kebijakan ini dibuat semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan menekan angka penyalahgunaan jabatan.

Sesuai dengan tujuan dari Perbub 95 tahun 2016, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh PNS khususnya eselon II, III dan IV setelah mendapatkan tambahan penghasilan, selain itu untuk mamastikan keberadaan gaya hidup hedonisme pasca peningkatan kesejahteraan ekonomi PNS yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo.

Metode penelitian yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, dimana pengumpulan data dengan mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada kehidupan PNS Eselon II, III dan IV setelah mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa TPP yang diterima PNS Eselon II, III dan IV Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo menciptakan peningkatan ekonomi PNS, hal ini dapat dilihat dari penggunaan TPP sebagian besar dialokasikan untuk ditabung dan juga untuk membiayai kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi oleh gaji bulanan PNS, namun tidak ditemukan tindakan yang mengarah pada gaya hidup hedonisme. Dampak positif lainnya adalah semakin rendahnya angka penyalahgunaan jabatan di Kabupaten Probolinggo apabila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah tetangga seperti Kota Probolinggo dan Kabupaten/Kota Pasuruan. Dengan demikian TPP sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan PNS Eselon II, III dan IV sehingga menciptakan mental pejabat yang tidak tergoda oleh tindakan korupsi.

Kata Kunci : PNS, TPP, Kesejahteraan dan Hedonisme

SUMMARY

Harmanto, 2019, **Analysis of Probolinggo Regent Regulation No. 95 of 2016 concerning Additional Income for Civil Servants (PNS) in the Probolinggo District Government towards Improving Civil Servants' Welfare and the Potential of Hedonism Lifestyle (Case Study of Echelon II, III and IV Civil Servants Office of Animal Husbandry and Animal Health Probolinggo Regency)**, Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP.

The classic problem in Government agencies is the misuse of office which leads to criminal sanctions. One reason is the lack of income received by civil servants so that they dare to commit acts of corruption to enrich themselves and lifestyle that is all luxurious but not commensurate with income. In addition, the trend is the increasing number of civil servants who apply for loans at conventional banks to get fresh funds, where the funds are usually used for investment or buying goods. Civil servants at the Livestock and Animal Health Service Office have almost 85% of debts at the Bank Jatim Kraksaan Branch so that not a few of them receive monthly income under one million. To increase the income of civil servants, the Government of Probolinggo Regency from 2016 until now (2019) provides additional income for civil servants as outlined in Probolinggo Regent Regulation Number 95 of 2016, this policy is made solely to improve the welfare of civil servants and reduce the rate of abuse of office.

In accordance with the objectives of Perbub 95 in 2016, this study is intended to determine whether there is an increase in welfare felt by civil servants especially echelon II, III and IV after obtaining additional income, in addition to ensuring the existence of a hedonism lifestyle after increasing the economic welfare of civil servants in Probolinggo District Animal Husbandry and Animal Health Service.

The research method used is Descriptive Qualitative, where data is collected by describing and describing phenomena that exist in the lives of Echelon II, III and IV civil servants after obtaining additional income by means of observation, interviews and documentation.

The results of this study can be concluded that the TPP received by Echelon II, III and IV PNS of Probolinggo District Animal Husbandry and Animal Health Service created an increase in civil servant economy, this can be seen from the use of TPP mostly allocated for savings and also to finance family needs that were not met by PNS monthly salary, but no action was found that led to the hedonism lifestyle. Another positive impact is the lower rate of office abuse in Probolinggo Regency when compared to neighboring Regional Governments such as the City of Probolinggo and Regency / City of Pasuruan. Thus TPP is very effective in improving the welfare of Echelon II, III and IV civil servants so as to create mental officials who are not tempted by acts of corruption.

Keyword : Civil Servants, Additional Civil Servants, Welfare and Hedonism